



**SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KONSOLIDASI KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PUSAT DAERAH

**DISAMPAIKAN OLEH :
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)**

JAKARTA, NOVEMBER 2010

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Dasar Hukum:
 - Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBY-Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.

TUGAS TNP2K

TNP2K Bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

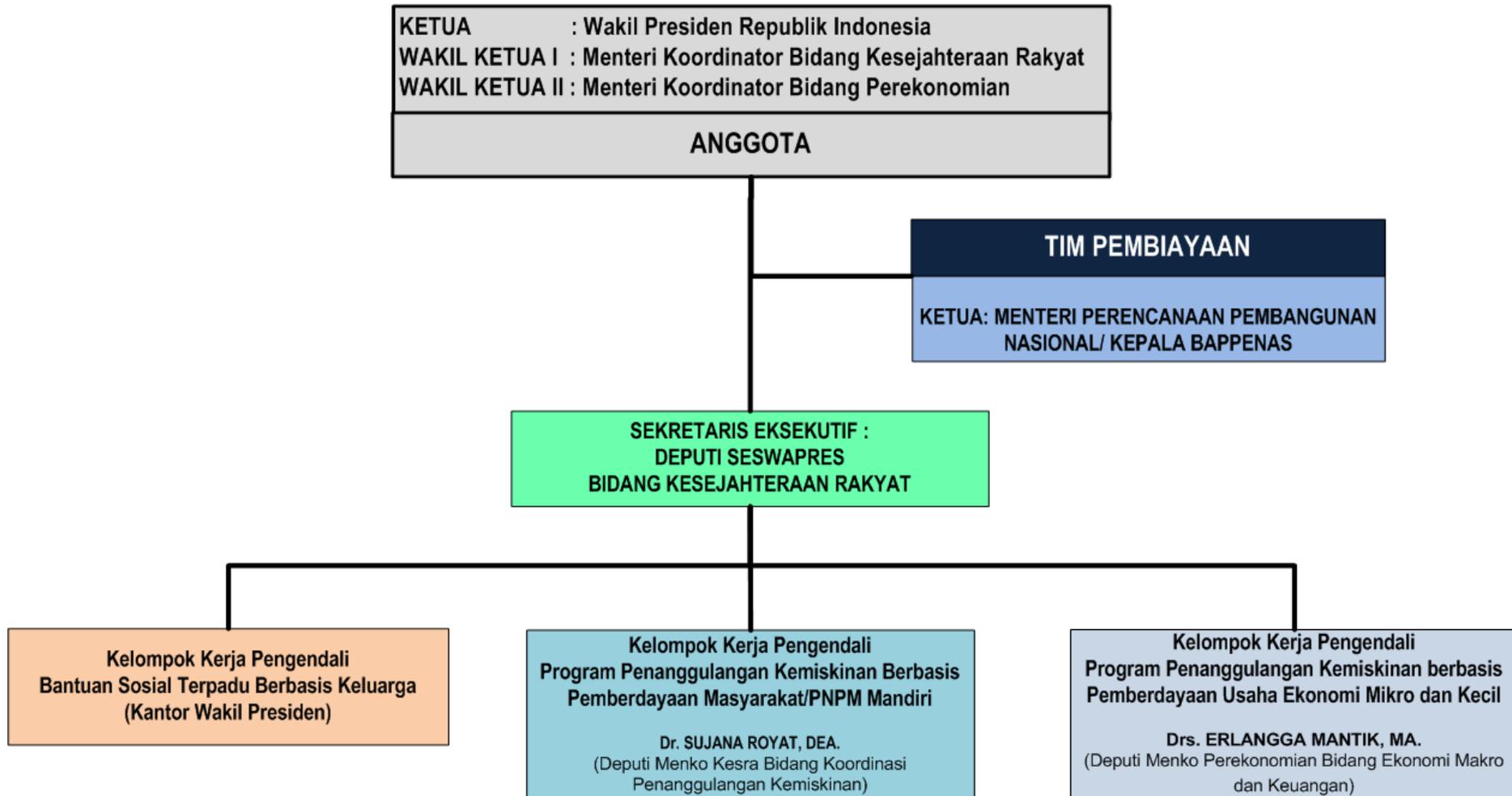
KEANGGOTAAN TNP2K

- Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - Ketua : Wakil Presiden
 - Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan

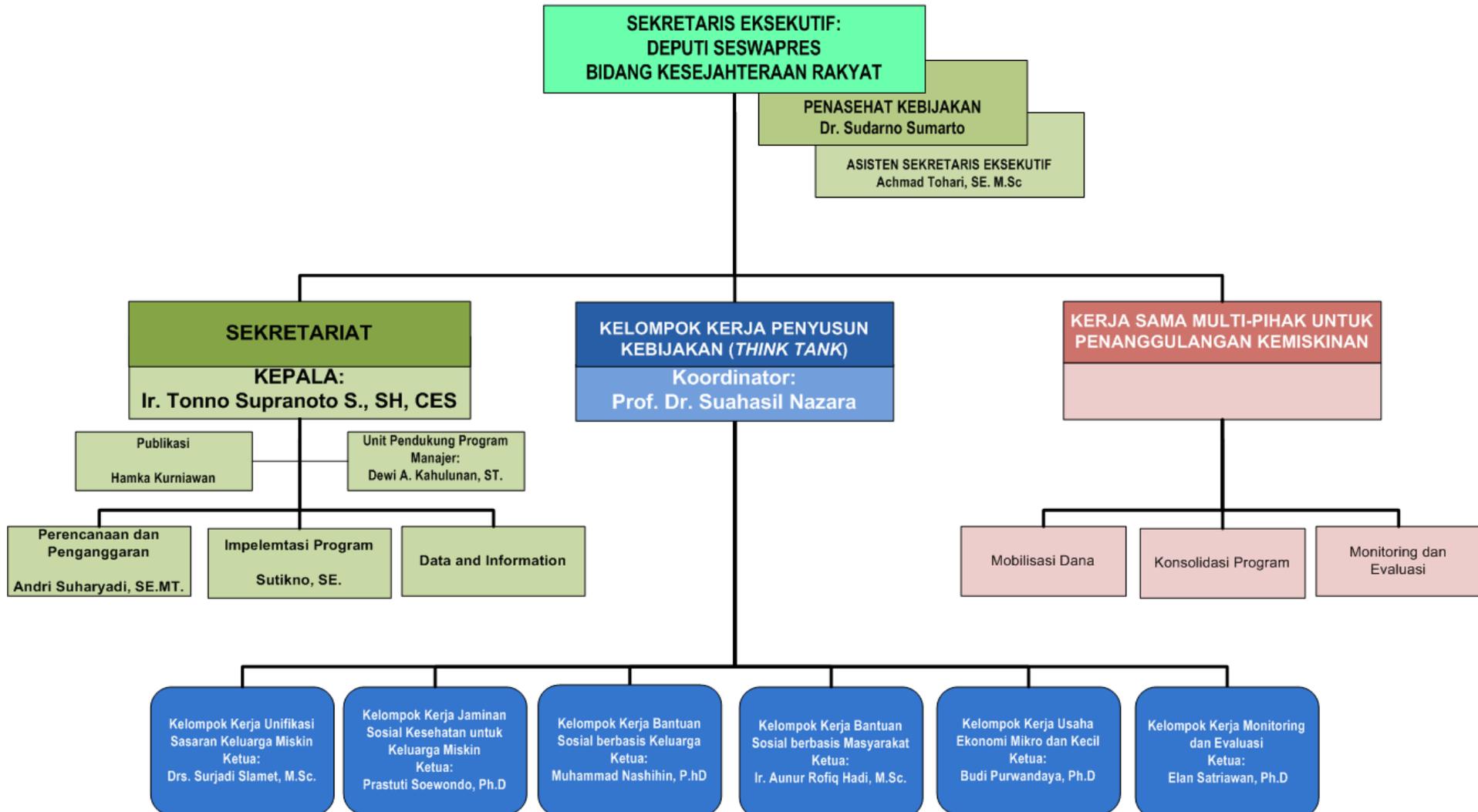
ANGGOTA TNP2K:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Pendidikan Nasional
6. Menteri Pekerjaan Umum
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kepala UKP4)
11. Sekretaris Kabinet
12. Kepala Badan Pusat Statistik
13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Ketua

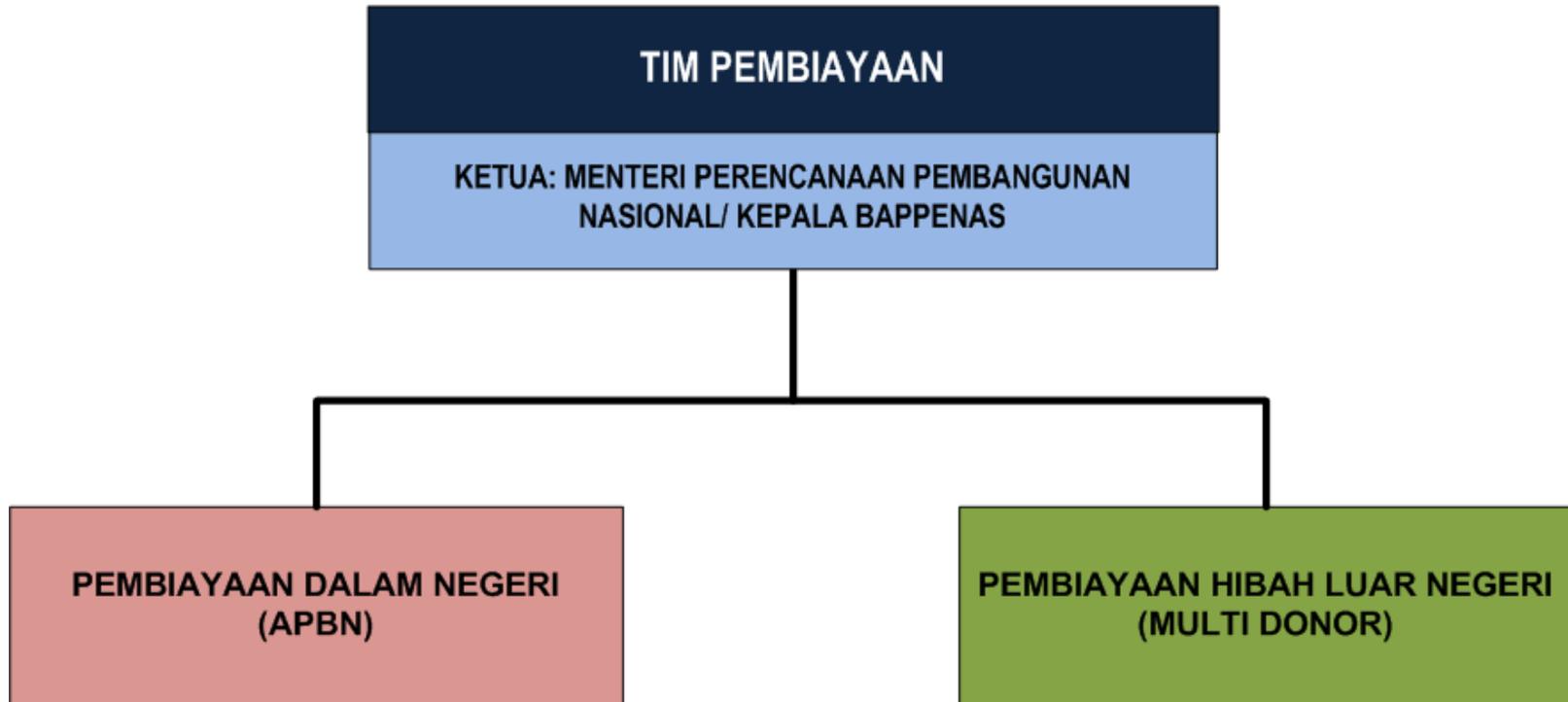
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



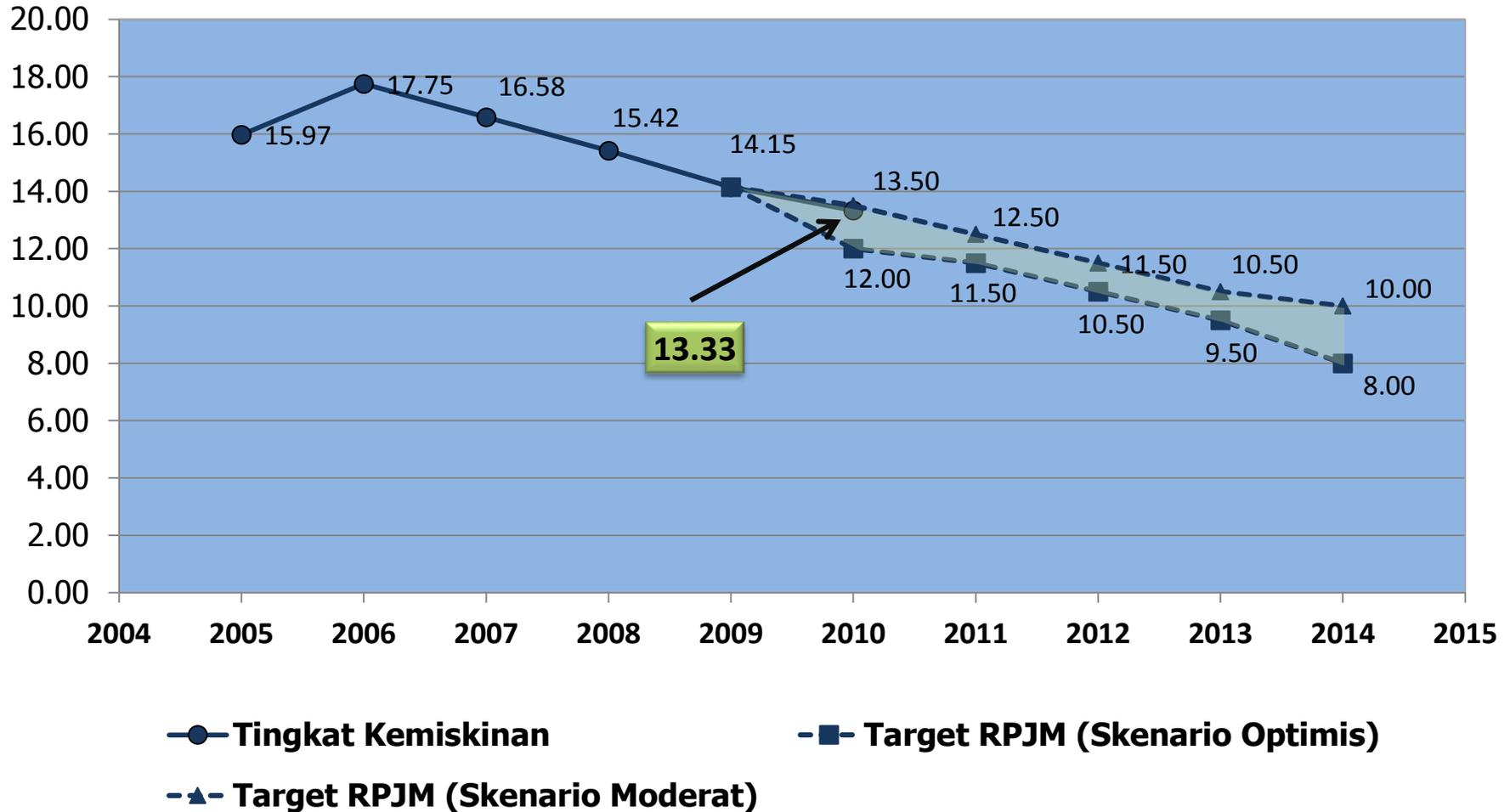
TIM PEMBIAYAAN



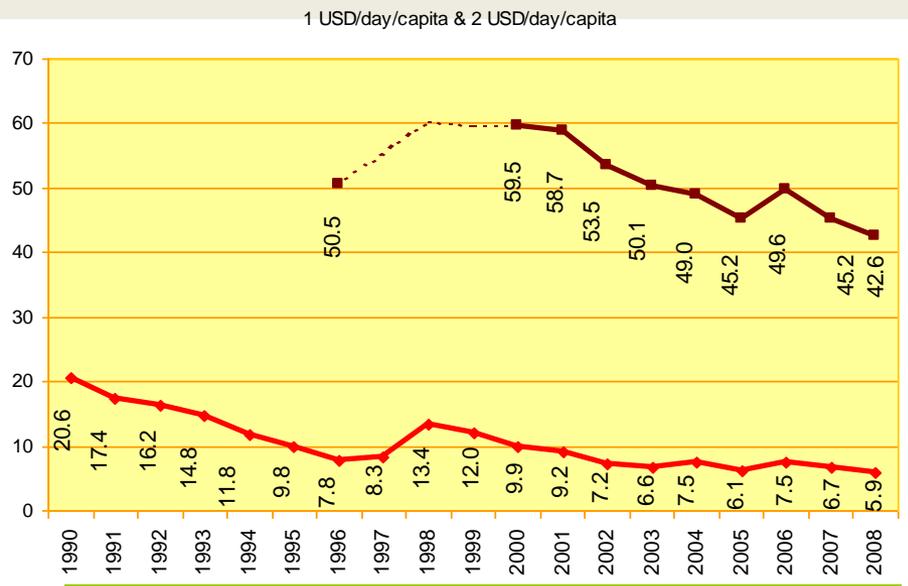
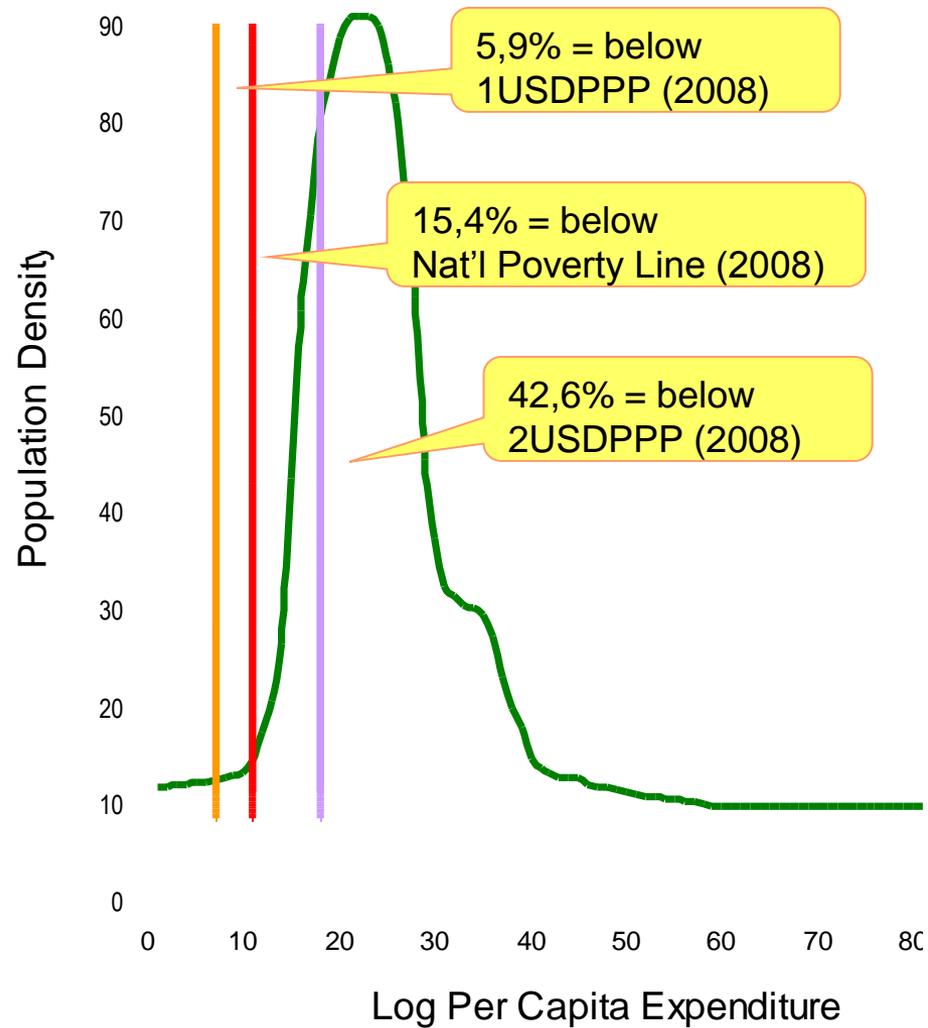
SASARAN RPJM

TAHUN		PERTUMBUHAN EKONOMI	INFLASI	PENGANGGURAN TERBUKA				PENDUDUK MISKIN	
				Juta Orang		% thd. Angkatan Kerja		Juta Orang	% thd. Penduduk
2009	RPJM	7.6	3	5.7		5.1		18.8	8.2
	RKP	6	6			7-8			12-14
	REALISASI	4.2	2.45	FEB. 9.26	AGST. 8.96	FEB. 8.14	AGST. 7.87	32.53	14.15
2010	RPJM	5.5 - 5.6	4.0 - 6.0	8.8		7.6			12-13.5
	RKP			9		7.6			
	REALISASI		2.42*	FEB. 8.59	AGST.	FEB. 7.41	AGST.	31.02	13.33
2011	RPJM	6.0 - 6.3	4.0 - 6.0			7.3-7.4			11.5-12.5
	RKP			8.3		7			
	REALISASI			FEB.	AGST.	FEB.	AGST.		
2014	RPJM	7.0 - 7.7	3.5 - 5.5			5.0 - 6.0			8.0 - 10.0

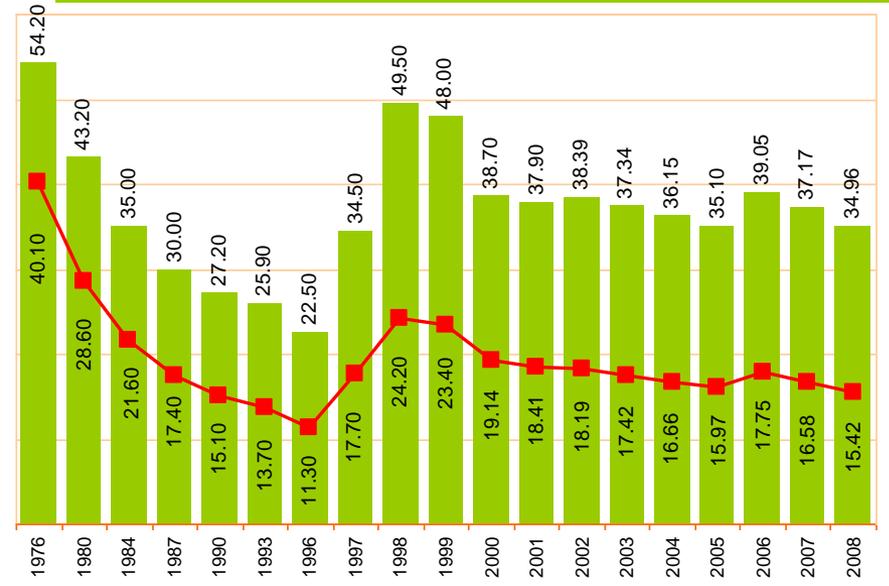
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAI



Log Annual Per Capita Expenditure, 2008 1 USD/day/capita & 2 USD/day/capita



National Poverty Line

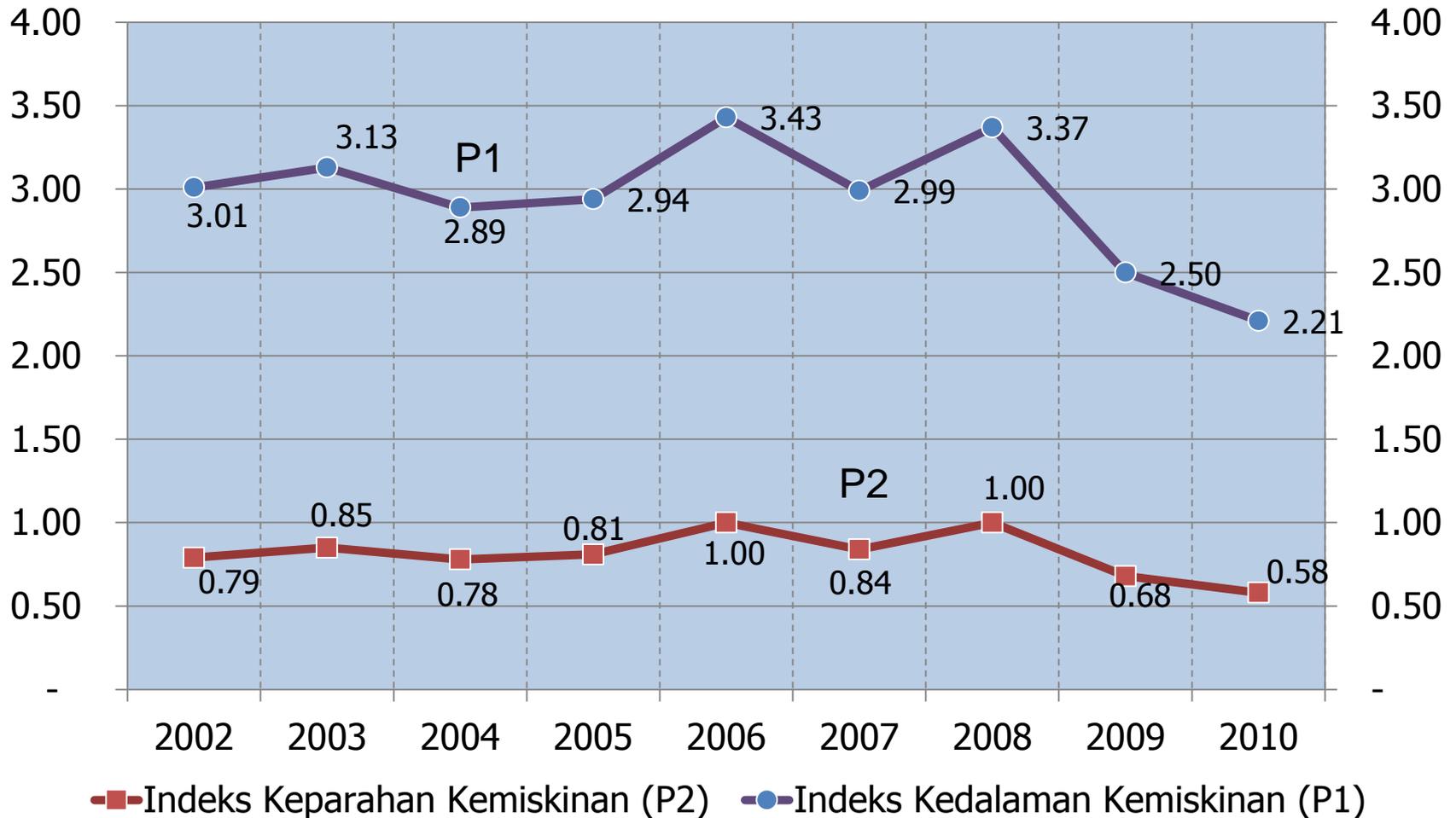


Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
 Persentase Penduduk Miskin (%)

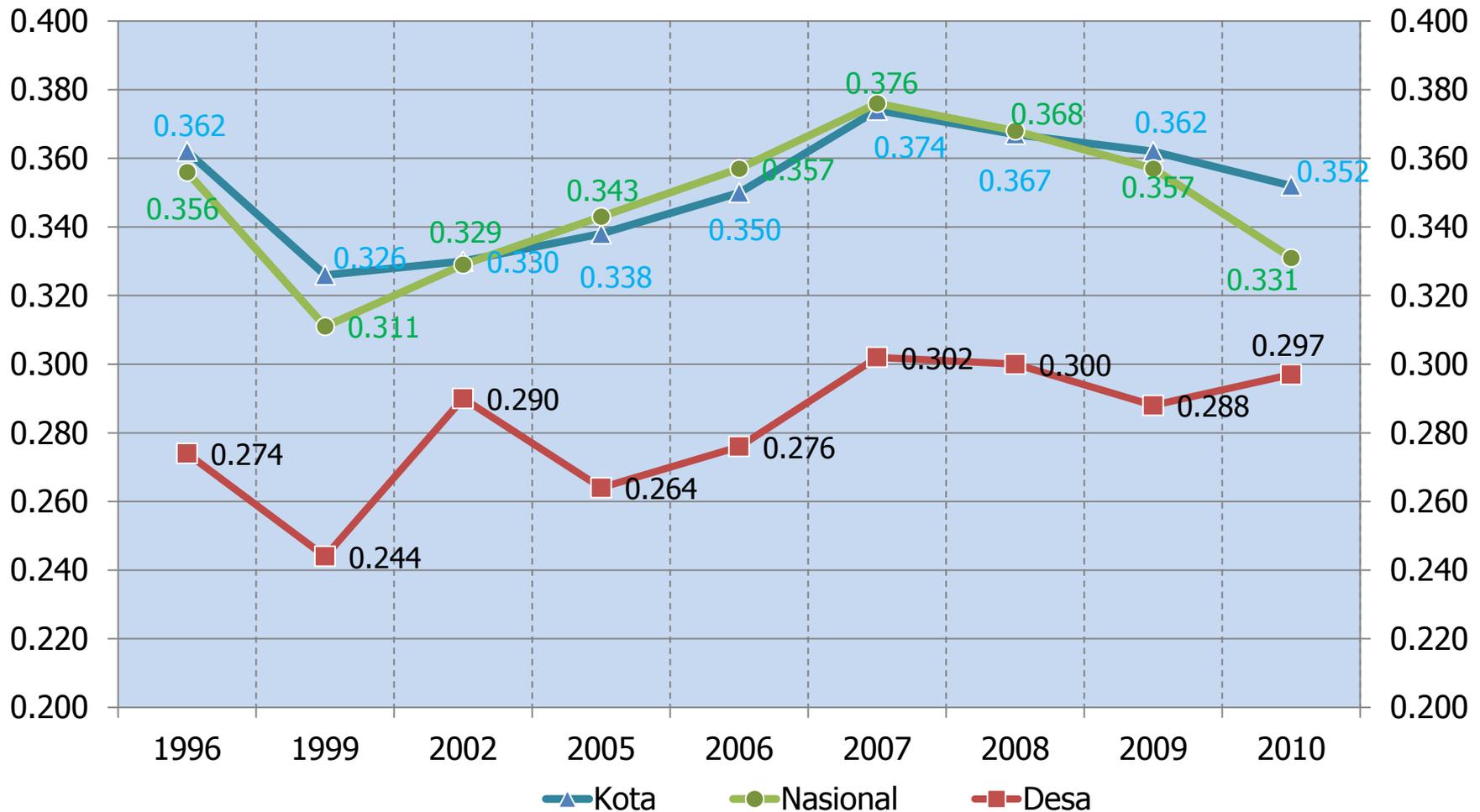
PENGELUARAN KELOMPOK DESIL TERENDAH MENGALAMI PENINGKATAN

Desil	Maret 2010			PERUBAHAN Maret 2009 – Maret 2010		
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita			K	D	K+D
	K	D	K + D			
10	204,541	148,019	175,314	20.53	14.92	24.27
20	272,294	190,368	229,940	17.04	13.08	21.77
30	322,301	218,523	268,644	14.44	11.42	19.56
40	375,996	247,524	309,657	13.42	11.32	18.83
50	441,289	283,164	359,492	14.39	13.07	19.58
60	520,097	326,570	420,060	15.78	15.81	20.62
70	622,076	380,144	496,919	17.28	18.43	21.58
80	762,429	452,576	602,381	18.62	21.48	21.34
90	975,213	553,490	757,074	18.02	20.87	17.02
100	1,774,622	912,969	1,329,158	8.20	15.72	3.52
Total	627,043	371,330	494,845	14.22	16.46	15.08

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENGALAMI PERBAIKAN



GINI RASIO MENGALAMI PERBAIKAN



MEMBACA DATA PENGANGGURAN DARI PERSPEKTIF LAIN

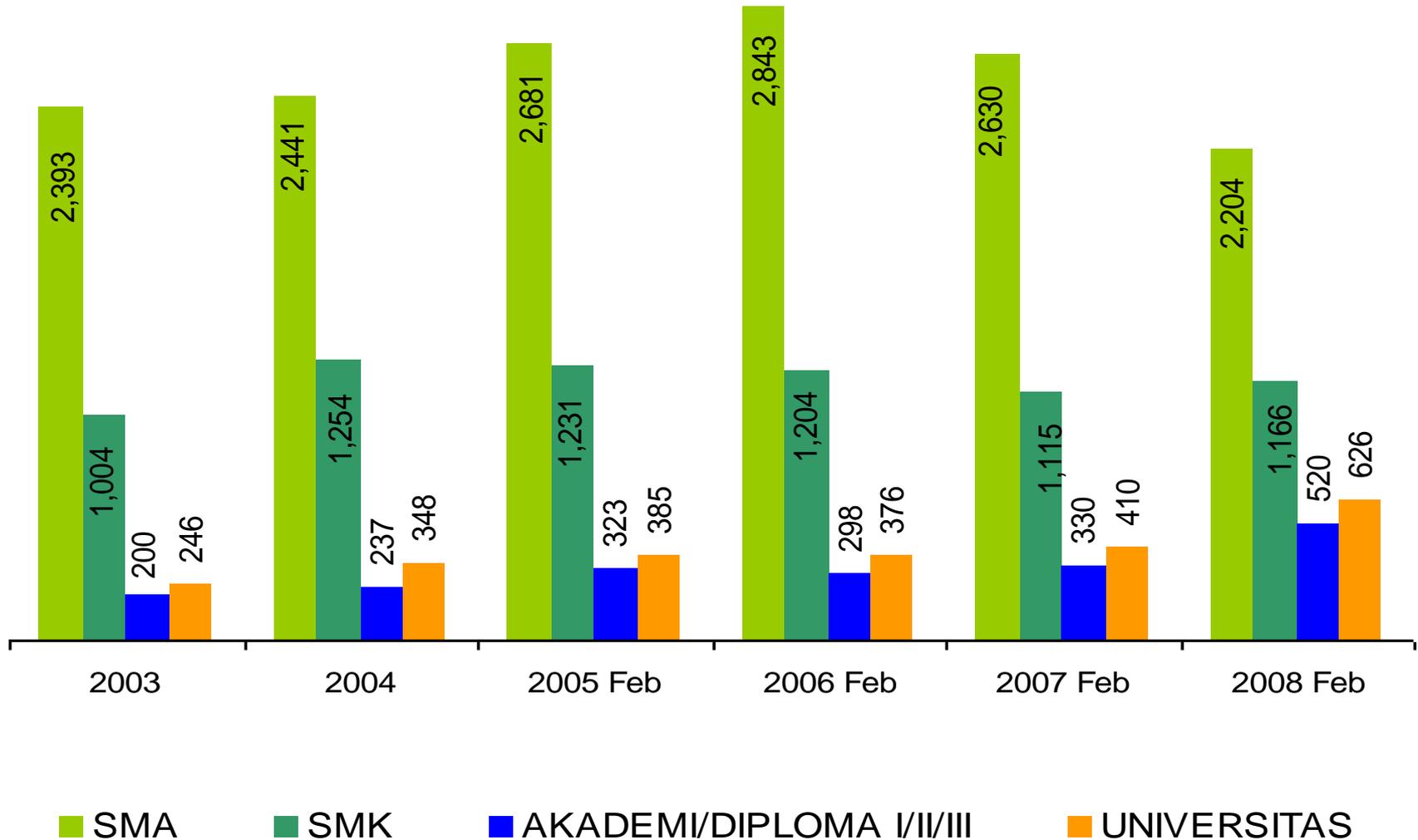
- Fenomena Perkotaan:*)
Perkotaan 10,93% (Tingkat Pengangguran), 5,19 juta (55,22%).
Perdesaan 6,52% (Tingkat Pengangguran), 4,21 juta (44,78%).

→ Kebalikan dari Fenomena Kemiskinan:**)
Perkotaan 12,77 juta (11,65%).
Perdesaan 22,19 juta (18,93%).
- Tingkat Pengangguran Usia Muda Lebih Tinggi:*)

15-19	28,3%
20-24	20,3%

→ Pemecahannya tidak semata membuka kesempatan kerja tetapi juga akses pendidikan
- Masalah Pengangguran tidak selalu identik dengan Kemiskinan:*)
Lulusan SMA ke atas 50,81%
→ Memilih pekerjaan/mampu menunggu pekerjaan yg baik
Lulusan SMP ke bawah 49,19%

PENGANGGURAN TERDIDIK TAHUN 2003-2008



PROPORSI PEKERJA BERPENGALAMAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA, 1998-2008

	1998	2000	2002	2004	2005	2006	2007	2008
Nasional	38.7	28.9	37.2	34.3	34.0	33.0	48.0	45.0
Kota	39.5	32.9	39.8	38.5	40.0	35.0	50.0	48.0
Desa	37.4	23.0	32.9	28.0	26.0	25.0	41.0	39.0

➔ Mereka memilih untuk menganggur (karena lebih mampu) sampai memperoleh pekerjaan yang baik.

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Periode Maret 2009 – Maret 2010:

14,7 juta orang keluar dari kemiskinan, 13.2 juta masuk kembali ke bawah garis kemiskinan, net 1,5 juta orang keluar dari kemiskinan

I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
- Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
- Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menyempurnakan Pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: Inclusive Growth

- UMKM
 - Iklim Usaha
 - ☐ Pasar Kerja yg Luwes
 - ☐ Infrastruktur
- Industri Manufaktur Padat Pekerja
- Konektivitas Ekonomi
 - ☐ Infrastruktur
- Pembangunan Perdesaan
- Pembangunan Pertanian

INSTRUMEN UTAMA

1. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Individu atau Rumah Tangga (Klaster I).
2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Komunitas (Klaster II).
3. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III).

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH

1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM

DIMONITOR MELALUI INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 DAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPK DAERAH?

1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari:

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah.
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD).
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

MANFAAT BANTUAN TUNAI BERSYARAT (*CONDITIONAL CASH TRANSFER*)

1. Untuk jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
 - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin)
 - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).
3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
4. Mengurangi pekerja anak.
5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender).

SKENARIO BESARAN BANTUAN

Skenario Bantuan	Bantuan per RTM per tahun (Rp)
Bantuan tetap	200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:	
a. Anak Usia Balita	800.000
b. Ibu Hamil/Menyusui	800.000
c. Anak Usia SD/MI	400.000
d. Anak Usia SMP/MTs	800.000
Rata-rata bantuan per RTSM	1.390.000
Bantuan minimum per RTSM	600.000
Bantuan maksimum per RTSM	2.200.000

Catatan:

- Bantuan Per RTSM dibatasi maksimum Rp.2.200.000 dan jumlah anak 3.
- Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas.
- Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
- Besar bantuan rata-rata adalah 16% dari batas pendapatan RTSM per tahun.
- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% dari batas pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

LOKASI PKH SAMPAI TAHUN 2009 (726 .376 RTSM, Anggaran Rp. 1,1 T)

NO	PROVINSI	RTSM
1	SUMATERA BARAT (1 Kab)	8.005
2	DKI. JAKARTA (1 Kota)	7.005
3	JAWA BARAT	199.42
4	JAWA TIMUR	280.114
5	NUSA TENGGARA TIMUR	69.287
6	SULAWESI UTARA	25.439
7	GORONTALO	9.174
8	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	13.276
9	SUMATERA UTARA	42.311
10	DI. YOGYAKARTA	18.425
11	BANTEN	27.215
12	NUSA TENGGARA BARAT	11.973
13	KALIMANTAN SELATAN	14.732
JUMLAH		726.376

TAMBAHAN LOKASI PKH TAHUN 2010

NO	PROVINSI	RTSM
1	BALI (2 Kab)	5,000
2	SULAWESI SELATAN (3 kab)	36,000
3	SULAWESI TENGAH (2 kab)	8,000
4	KALIMANTAN TENGAH (2 Kab)	5,000
5	KEPULAUAN RIAU (2 kab)	6,000
6	BENGKULU (2 Kab)	8,000
7	KALIMANTAN BARAT (2 Kab)	7,000
8	PROVINSI PESERTA PKH 2009 (3 kab)	15,000
	TOTAL	90,000

→ Keseluruhan RTSM adalah 816.000, Anggaran Rp. 1,3 T

BANTUAN KESEHATAN (JAMKESMAS)

Pelayanan Kesehatan Dasar dan Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Deskripsi dan Ukuran Program:

- Tujuan program adalah untuk meningkatkan akses kualitas pelayanan kesehatan untuk semua warga, khususnya untuk keluarga miskin dalam upaya memperbaiki indikator capaian kesehatan.
- Program ini didisain untuk mencakup:
 - Gratis untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi semua orang dan;
 - Gratis pelayanan opname pada kelas 3 bagi penduduk miskin.
- Anggaran program Jamkesmas untuk tahun 2010 adalah **5.1 trillion dan mencakup** 76.4 juta penduduk miskin.

Reallocation Schemes

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemerintah akan menyalurkan dana untuk Puskesmas melalui pemerintah untuk mencakup:

- Pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas untuk semua penduduk beserta dana operasional Puskesmas.
- Pelayanan kelahiran bayi di Puskesmas oleh bidan dengan mencakup kelahiran bayi dan faktor-faktor penunjangnya
- Merevitalisasi Posyandu dan perbaikan gizi.

Asuransi Kesehatan

Pemerintah akan menyalurkan dana melalui PT ASKES dan akan melakukan reimbused pengeluaran kelas tiga untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, baik perawatan jalan atau opname. Kegiatannya mencakup:

- Perawatan opname di rumah sakit kelas 3.
- Menindaklanjuti rawat jalan.
- Servis yang bersifat emergensi seperti ambulan.

BANTUAN PENDIDIKAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN PROGRAM BEASISWA

Deskripsi dan Ukuran Program:

- Block grants diberikan kepada sekolah negeri dan swasta pada tingkat SD dan SMP.
- Tujuan program adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah di dalam menurunkan biaya persiswa yang harus dibayar oleh orang tua, tetapi juga memperbolehkan sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
- Anggaran didasarkan pada tingkat partisipasi dan tingkatan sekolah: Untuk SD Rp. 235,000 /siswa/tahun, sedangkan untuk SMP Rp. 324,500/siswa/tahun.

ALOKASI BUDGET UNTUK PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

AKTIVITAS	2008		2009		2010	
	TARGET	BUDGET	TARGET	BUDGET	TARGET	BUDGET
	Siswa	Juta Rp.	Siswa	Juta Rp.	Siswa	Juta Rp.
Bantuan Operasional						
SD	26,862,332	6,823,032	27,130,968	10,486,868	27,673,587	11,002,605
SMP	9,015,069	3,191,334	9,465,836	5,406,804	9,655,153	5,514,940
Bantuan Operasional Manajemen						
SMA	1,063	85,000	2,481,244	223,312	2,100,000	189,000
SMK	2,792,768	209,457	3,000,000	360,000	3,000,000	360,000

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PROGRAM BEASISWA BAGI PENDUDUK MISKIN

TINGKAT PENDIDIKAN	2008		2009		2010	
	TARGET	BUDGET	TARGET	BUDGET	TARGET	BUDGET
	SISWA	JUTA RP.	SISWA	JUTA RP.	SISWA	JUTA RP.
SD	898,400	323,424	1,786,800	684,580	1,796,800	677,261
SMP	499,105	359,355	751,193	398,883	751,193	413,156
SMA	310,609	242,275	248,124	193,536	248,124	193,537
SMK	410,020	329,168	329,000	256,620	305,535	251,484
<u>UNIVERSITAS</u>	<u>165,116</u>	<u>443,351</u>	<u>590,000</u>	<u>930,000</u>	<u>211,967</u>	<u>635,901</u>

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

BERAS MISKIN (RASKIN)

DESKRIPSI PROGRAM RASKIN

- Program RASKIN adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan menurunkan beban keuangan keluarga dengan memberikan subsidi beras.
- Setiap keluarga target seharusnya menerima 10 kg. beras setiap bulan dengan harga Rp. 1,600 per-kg pada titik distribusi.
- Bulog bertanggung jawab untuk mendistribusikan beras ke titik distribusi, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendistribusikan beras dari titik distribusi ke keluarga sasaran.

EVALUASI DAMPAK PROGRAM RASKIN

Berdasarkan kajian empiris, Program RASKIN memberikan dampak kepada penerimanya, meliputi:

- Memperbaiki kuantitas dan kualitas konsumsi penduduk miskin. Program RASKIN juga mampu menyelesaikan permasalahan kurang gizi yang sering terjadi pada kelompok miskin.
- Memberikan kesempatan bagi penerima program untuk menabung guna memenuhi kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan..
- Program RASKIN dapat menjaga stabilitas harga beras..

JUMLAH RTS, ALOKASI DAN REALISASI SUBSIDI PROGRAM RASKIN

TAHUN	2008	2009	2010
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) (Ribu)	19.100	18.497	17.488
Alokasi Beras (Kg/RTS/Bulan)	15	15	12
Realisasi Anggaran Subsidi (Triliun RP)	-	12,98	11,38

TERIMA KASIH